

Upaya Perlawanan Perempuan Afghanistan dalam Menghadapi Ancaman Opresi/Kebijakan Opresif Taliban

Oriza Dian Lestari¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia
20160631260039@student.unsika.ac.id

ABSTRACT

The Taliban managed to retake the Afghan capital, Kabul, on August 15, 2021, after 20 years ago the Taliban took control of the city. Many people, ranging from civilians to foreigners, especially women, are deprived of their freedom by implementing the policies they make. Various actions carried out by women are regulated by the Taliban such as going to school, how to dress, and others. This causes women to fight against the Taliban in order to regain their rights that have been taken away. This study uses a qualitative method with a literature study approach. The purpose of this study was to see what kind of resistance efforts were carried out by women in regaining their rights that had been taken by the Taliban in Afghanistan. This study will explain the condition of women before and after the Taliban came to power, the oppressive actions of the Taliban against women, women's efforts to fight against the Taliban's power and the obstacles faced by women in fighting against the domination of the Taliban. In the end, the various efforts that women continued to make to fight against the domination of the Taliban were met with threats of violence and murder and these actions further cornered the efforts of women's resistance.

Keywords: Afghanistan, Taliban Group, Women.

ABSTRAK

Taliban berhasil menduduki kembali ibu kota Afghanistan, yaitu Kabul pada 15 Agustus 2021 setelah 20 tahun silam Taliban menguasai kota tersebut. Banyak orang, mulai dari warga sipil hingga orang asing khususnya perempuan yang dirampas kebebasannya dengan menerapkan kebijakan yang mereka buat. Berbagai tindakan yang dilakukan perempuan diatur oleh kelompok Taliban seperti bersekolah, cara berpakaian, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan perempuan melakukan perlawanan terhadap Taliban demi memperoleh kembali hak mereka yang sudah dirampas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk melihat seperti apa upaya perlawanan yang dilakukan perempuan yang hak-haknya diambil oleh Taliban di Afghanistan. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana kondisi perempuan sebelum dan sesudah Taliban berkuasa, tindakan opresif Taliban terhadap perempuan, upaya perempuan dalam melawan kekuasaan Taliban dan kendala yang dihadapi perempuan dalam melawan dominasi Taliban. Pada akhirnya, berbagai upaya yang terus dilakukan perempuan untuk memperoleh kembali hak-hak mereka yang diambil oleh Taliban dibalas dengan ancaman kekerasan dan pembunuhan dan tindakan tersebut semakin menyudutkan upaya perlawanan yang dilakukan perempuan.

Kata Kunci: Afghanistan, Kelompok Taliban, Kaum Perempuan.

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman, peran perempuan di berbagai kegiatan semakin diakui. Kini perempuan tidak lagi dipandang sebelah mata karena mereka dapat membuktikan tidak hanya laki-laki yang dapat melakukan aktivitas tertentu, perempuan juga mempunyai hak untuk bebas melakukan hal-hal yang mereka sukai tanpa adanya larangan. Ketika hak mereka dibatasi maka mereka akan memperjuangkan hak-hak

tersebut. Perempuan ikut berperan penting di berbagai aksi perjuangan untuk menolak serta mengusir Taliban dari Afghanistan. Taliban sendiri pertama kali mengambil alih Afghanistan pada akhir bulan September 1996 dengan menguasai kota Kabul, dimana wilayah tersebut merupakan wilayah yang paling strategis di Afghanistan secara politik. Hingga akhirnya pada tahun 2001, Taliban berhasil menguasai seluruh wilayah Afghanistan, kecuali sebagian kecil wilayah bagian utara. Namun, pada tahun itu pula Taliban berhasil diusir keluar dari teritorial Afghanistan karena kedatangan Amerika Serikat yang bertujuan untuk menghancurkan jaringan Al Qaeda yang diduga sebagai kelompok pengeboman Menara Kembar di New York. Hal tersebut membuat Amerika Serikat juga menggulingkan Taliban dari kota Kabul karena tidak mau menyerahkan Osama bin Laden yaitu pimpinan kelompok Al Qaeda. Setelah dua puluh tahun Afghanistan bebas dari ancaman Taliban, pada 15 Agustus 2021 Taliban berhasil kembali memasuki kota Kabul dan mengambil alih Istana Kepresidenan Afghanistan. Banyak warga Afghanistan memenuhi Bandara untuk meninggalkan negaranya karena mereka tidak ingin merasakan kekejaman kelompok Taliban lagi untuk yang kedua kalinya (CNN Indonesia, 2021).

Selama masa pemerintahan Taliban, perempuan diperlakukan secara semena-mena, dimana mereka harus mengikuti aturan yang telah dibuat oleh kelompok tersebut. Diskriminasi terhadap kaum perempuan terus dilakukan, mulai dari kekerasan, ketidakadilan, serta menjadikan mereka budak. Di samping itu, kekerasan seksual juga dialami oleh perempuan di Afghanistan. Kelompok Taliban juga membuat kebijakan-kebijakan yang mengekang kaum perempuan Afghanistan. Karena Taliban merupakan kelompok Islam yang menerapkan Syariah Islam versi mereka, Taliban berpendapat bahwa perempuan hanya diperbolehkan untuk tinggal di rumah dan melayani suami-suami mereka, perempuan diperbolehkan keluar rumah dengan catatan mereka harus ditemani oleh mahram atau laki-laki dari anggota keluarganya. Bahkan perempuan tidak boleh bertemu dengan laki-laki yang berusia di atas 12 tahun selain anggota keluarganya. Karen adanya batasan yang ketat antara laki-laki dengan perempuan, saat bersekolah kelas antara laki-laki dengan perempuan harus dipisahkan. Mereka juga tidak boleh diajar oleh guru yang berlawanan jenis.

Kebijakan masa pemerintahan Taliban di Afghanistan terus-menerus mengeluarkan aturan yang semakin mengekang kebebasan kaum perempuan. Taliban menerapkan aturan baru bagaimana cara berpakaian bagi perempuan, mereka mewajibkan setiap perempuan Afghanistan yang berusia delapan tahun keatas untuk menutup auratnya sesuai dengan Syariah Islam yaitu mengenakan busana muslim ataupun pakaian syar'i yang bisa dikenal di Afghanistan bernama *burqa*. Mereka tidak boleh memamerkan kecantikannya dengan menggunakan riasan wajah ataupun sepatu hak tinggi. Selain itu, perempuan tidak diperbolehkan untuk berbicara dengan suara yang keras hingga terdengar oleh laki-laki bahkan saat keramaian. Mereka juga tidak diperbolehkan untuk duduk di balkon rumah mereka karena dapat dilihat oleh laki-laki. Perempuan tidak diperbolehkan untuk berolahraga karena dianggap tidak pantas dan tidak diperlukan bagi kaum perempuan. Setiap warga Afghanistan khususnya perempuan harus menaati semua kebijakan yang telah dibuat oleh kelompok Taliban. Bagi mereka yang melanggar aturan-aturan tersebut, maka akan mendapatkan hukumannya tersendiri. Hukumannya adalah Taliban tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.

Kaum perempuan Afghanistan sadar bahwa peraturan yang dibuat oleh kelompok Taliban membuat mereka kehilangan kebebasannya. Taliban berusaha membuat aturan yang mengekang kaum perempuan untuk tunduk dan patuh terhadap laki-laki seakan-akan mereka adalah kaum yang lemah dan harus selalu berada di belakang laki-laki. Kaum perempuan tidak hanya diam saja, karena merasa hak-haknya telah dirampas, mereka ikut berjuang untuk merebut kembali hak sekaligus merebut kembali negaranya.

Perempuan Afghanistan merasa tidak hanya laki-laki yang dapat berolahraga ataupun keluar rumah sendirian. Mereka menentang peraturan yang telah dibuat oleh Taliban untuk membuktikan bahwa mereka tidak takut dengan aturan serta ancaman yang dibuat kepada kaum perempuan. Hal tersebut berkaitan dengan tujuan dari penulisan ini yaitu untuk melihat berbagai upaya perlawanan perempuan dalam melawan dominasi Taliban. Dalam hal ini, perempuan Afghanistan merasa bahwa mereka juga bebas untuk melakukan apapun tanpa memandang jenis kelamin dan tanpa rasa takut. Dalam hal ini, perempuan Afghanistan memiliki upaya dan strategi perjuangan tersendiri untuk ikut berjuang demi mengembalikan kebebasan mereka sebagai perempuan dan negaranya yang telah dikuasai kelompok Taliban.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan untuk mendukung serta membandingkan hasil analisis yang dituliskan. Penelitian ini memiliki fokus kajian terhadap upaya dan strategi perempuan Afghanistan dalam memperoleh Kembali hak-hak mereka yang telah diambil oleh dominasi Taliban. Penelitian Pertama, berjudul “Peran *United Nations Women* dalam Menanggulangi Diskriminasi terhadap Perempuan di Afghanistan” yang diteliti oleh Fitrah Awaliyah Rumadaul program studi hubungan internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia pada tahun 2017. Terpublikasi melalui *Global Political Studies Journal* Vol.1 No.1 April 2017. Hasil dari jurnal ini menginformasikan bahwa peran *UN Women* dalam menanggulangi diskriminasi terhadap kaum perempuan Afghanistan tidak lepas dari program-program yang dijalankan *UN Women* yang memiliki dampak besar dalam meningkatkan kesadaran pentingnya peran wanita dalam suatu negara. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah setelah *UN Women* berhasil memasuki Afghanistan, mereka sukses menanggulangi diskriminasi dengan berbagai macam program dan memberikan dampak positif bagi kaum perempuan di Afghanistan (Rumadaul, 2017).

Penelitian kedua berjudul “Strategi *Women for Women (WFWI)* dalam Pemberdayaan Perempuan di Afghanistan” yang ditulis oleh Gilang Agung Septiadi pada program Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas pada tahun 2019. Jurnal ini terpublikasi pada *Frequency of Internasional Relations* Vol. 1 (1) 122-157 tahun 2019. Jurnal ini berisi tentang Strategi Pemberdayaan Perempuan di Afghanistan dan Strategi Pembangunan NGO.

Adapun strategi yang digunakan adalah: 1) *Earn and Saving Money*, yaitu dengan cara tidak memperbolehkan perempuan untuk berhitung menggunakan mesin hitung, memberikan upah minimum agar dapat menabung dan menemukan bisnis lokal untuk dipasarkan; 2) *Influencing and Decision Making*, yaitu pembelajaran mengenai hak mereka untuk mendiskusikan pentingnya kesetaraan gender dan penggunaan media

sosial untuk meningkatkan kesadaran terhadap kekerasan perempuan; 3) *Connecting to Network* adalah program untuk menghubungkan perempuan di Afghanistan dengan sponsor pendukung kemerdekaan perempuan; 4) *Men Edging* adalah program untuk mendorong pihak laki-laki untuk berpartisipasi dalam diskusi yang membantu mereka memahami caranya membentuk keamanan bagi perempuan dan pemberdayaan mereka secara sosial dan ekonomi. Kesimpulan dalam jurnal ini adalah persoalan diskriminasi perempuan di berbagai negara di dunia harusnya dimasukkan kedalam pembahasan utama dalam hubungan internasional (Septiadi, 2019).

METODE PENELITIAN

Analisis data terkait penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur berupa pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat yang kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis. Sumber data penelitian ini adalah menggunakan data sekunder dengan mencari sumber-sumber informasi yang bersifat dokumentasi, sehingga tidak perlu terjun secara langsung ke dalam lapangan tetapi dengan mengambil sumber referensi yang mendukung penelitian ini. Informasi-informasi tersebut diperoleh melalui media perantara berupa buku, jurnal, dan artikel terdahulu yang memiliki kaitan dengan sejarah Taliban, kebijakan masa pemerintahan Taliban di Afghanistan, serta peranan perempuan Afghanistan dalam menghadapi ancaman Taliban. Hal tersebut dilakukan untuk validasi semua data dengan meningkatkan ketekunan membaca berbagai referensi buku maupun dokumen-dokumen yang digunakan sebagai bahan referensi, sehingga dapat memeriksa bahwa data yang ditemukan dapat dipercaya.

KERANGKA PEMIKIRAN

TEORI FEMINISME LIBERAL

Perspektif kaum feminisme dalam teori hubungan internasional telah menunjukkan bahwa perempuan selalu menjadi yang kedua setelah laki-laki. Feminisme sendiri muncul sebagai teori atau gerakan sosial yang ingin memperjuangkan hak-hak perempuan agar setara dengan kaum laki-laki. Teori Feminisme Marxisme menyebutkan bahwa perempuan mengalami ketertinggalan tidak disebabkan oleh struktur sosial, politik, dan ekonomi yang berkaitan sangat erat dengan sistem kapitalisme, melainkan perempuan tidak boleh memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki (Ilyas, 2007). Dalam Teori Feminisme Sosialis juga menyatakan salah satu penyebab utama keterbelakangan perempuan bukanlah hidup dalam masyarakat. Karena perempuan yang tertindas ada dimanapun. Gerakan tersebut lebih fokus kepada posisi mereka yang tertindas (Ilyas, 2007). Hadirnya perspektif kaum feminisme memberikan tiga kontribusi penting: (1) Meredefinisi konsep keamanan; (2) Mematahkan mitos "Laki-laki sebagai Pelindung, Perempuan sebagai Yang Dilindungi"; dan (3) Memberikan penggambaran komprehensif tentang masalah keamanan sosial-ekonomi (Hadiwinata, 2017). Dengan adanya perspektif kaum feminisme ini, perempuan mulai bangkit dari keterpurukan. Banyak gerakan sosial yang memperjuangkan hak-hak perempuan atas penindasan yang mereka alami. Perempuan memiliki posisi yang sama dengan laki-laki, mereka bebas untuk melakukan apapun yang mereka mau dan tidak harus selalu berada dibelakang kaum laki-laki.

Salah satu jenis teori / aliran Feminisme yang relevan dalam kasus ini yaitu teori Feminisme Liberal. Teori ini menekankan nalar sebagai pijakan bagi perempuan untuk bisa memperoleh kedudukan setara dengan laki-laki dalam hal kesempatan dan hak. Hal ini berarti bahwa perempuan juga harus mempunyai kemampuan berpikir secara cerdas agar bisa meraih posisi sederajat dengan laki-laki. Sementara itu, Kholilah Ats-Tasbitah mengemukakan bahwa feminisme liberal merupakan paham yang berjuang untuk menghapuskan perbedaan seksual sebagai langkah awal menuju kesetaraan sejati (Azis, 2007). Untuk mewujudkan kesetaraan sosial antara laki-laki dan perempuan dapat dilakukan dengan membangun paradigma bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesederajatan sehingga tidak ada rasa superioritas bagi kaum laki-laki.

Pada bagian lain, Asmaeny Azis juga menyatakan bahwa perempuan sudah tidak bisa lagi dianggap sebagai kelas kedua dalam struktur sosial dan budaya (Azis, 2007). Perempuan sudah tidak bisa dianggap lemah karena secara nyata perempuan telah menampilkan wajah dan tingkah laku yang elegan bagi kepentingan kemanusiaan. Perempuan harus didorong sebagai salah satu elemen yang akan melawan ketidakadilan dan resistensi struktur sosial. Bias cara berpikir yang selalu menempatkan perempuan sebagai kelas marginal dan terpinggirkan akan melahirkan cara bersikap dan bertindak yang juga memojokkan perempuan dalam realitas sosial. Asmaeny Azis selanjutnya juga menyatakan bahwa, bagi feminisme liberal, konstruksi sosial budaya adalah bentukan sosial yang menempatkan perempuan sebagai kelompok marginal. Untuk itu, konstruksi sosial budaya semacam itu harus dihancurkan (Azis, 2007).

TEORI RESISTENSI JAMES C. SCOTT

James mendefinisikan perlawanan atau resistensi sebagai segala Tindakan yang dilakukan oleh kaum atau kelompok subordinat yang ditunjukkan untuk mengurangi atau menolak suatu klaim yang dibuat oleh pihak atau kelompok *superdinant* terhadap mereka. Dalam hal ini, Scott membagi perlawanan menjadi dua, yaitu perlawanan publik/terbuka (*public transcript*) dan perlawanan tersembunyi/tertutup (*hidden transcript*). Perlawanan terbuka memiliki ciri adanya interaksi terbuka antara kelas *subordinant* dengan kelas *superdinant*. Biasanya dilakukan dengan protes sosial dan demonstrasi dan lebih bersifat terorganisir, sistematis dan berpinsip. Manifestasi yang digunakan dalam resistensi merupakan cara kekerasan seperti pemberontakan.

Sementara perlawanan tertutup memiliki ciri interaksi antar kelas dilakukan secara tertutup/tidak langsung. Resistensi ini lebih bersifat simbolis atau ideologis dan merupakan penolakan terhadap kategori yang dipaksakan kepada masyarakat. James Scott mengungkapkan bahwa resistensi fokus pada bentuk-bentuk perlawanan yang benar-benar ada dan terjadi di sekitar kehidupan sehari-hari yang digambarkan secara jelas bagaimana bentuk perlawanan kaum minoritas lemah yaitu mereka yang tidak memiliki kekuatan dalam melakukan penolakan terbuka. Berdasarkan pemaparan tersebut, James C. Scott beranggapan bahwa perlawanan dilakukan karena adanya penindasan yang terjadi dalam keseharian masyarakat. Perlawanan digunakan oleh mereka yang tertindas sebagai alat untuk membela hak yang ada pada diri mereka. Hal tersebut yang menjadi alasan bagi mereka yang tertindas untuk mempertahankan subsistensi yang sudah ada dengan cara menolak perubahan yang ditetapkan melalui perlawanan (Scott, 2000).

HASIL DAN PEMBAHASAN

BENTUK OPRESI TALIBAN TERHADAP PEREMPUAN

Pada 15 Agustus 2021, Taliban berhasil kembali menguasai istana kepresidenan Afghanistan. Bersamaan dengan kejadian itu, banyak warga Afghanistan khususnya perempuan berlomba-lomba untuk menuju bandara agar dapat keluar dari negaranya. Mereka tidak ingin merasakan kembali kekejaman masa pemerintahan Taliban. Akibatnya, beberapa keluarga terpaksa mengirimkan putrinya ke Pakistan atau Iran untuk melindungi mereka dari kekejaman Taliban. Taliban sangat membatasi kemampuan wanita untuk bergerak di negaranya dengan kebijakan-kebijakan yang mereka buat.

Setidaknya ada 13 kebijakan Taliban yang membatasi kebebasan perempuan, yaitu: 1) Dilarang bepergian antar seorang laki-laki dari anggota keluarganya; 2) Dilarang berteman dengan laki-laki tanpa seizin anggota keluarganya; 3) Dilarang berinteraksi dengan laki-laki di atas 12 tahun selain anggota keluarganya; 4) Dilarang bersekolah di sekolah umum, mereka hanya boleh bersekolah di sekolah khusus perempuan; 5) Dilarang menggunakan riasan wajah termasuk cat kuku; 6) Dilarang bermain musik dan menari; 7) Jika perempuan bekerja, kelompok Taliban akan mengawal mereka pulang dan memerintahkan untuk kerabat laki-laki perempuan tersebut saja yang bekerja; 8) Mewajibkan perempuan untuk mengenakan burqa (pakaian yang menutup seluruh tubuh); 9) Dilarang berbicara menggunakan suara yang keras hingga terdengar oleh orang asing baik dalam pertemuan perempuan maupun di depan umum; 10) Dilarang menggunakan sepatu hak tinggi; 11) Dilarang duduk di balkon rumah; 12) Dilarang menampilkan gambar perempuan baik dalam perfilman maupun media yang lainnya; dan 13) Seorang guru dilarang memberikan pelajaran untuk siswa yang berjenis kelamin berbeda (Davies, 2021).

Taliban memiliki tujuan untuk menciptakan dunia yang damai dan tentram dengan cara membuat kebijakan sesuai dengan syariat Islam yang mereka anut. Mereka berpikir dengan kebijakan-kebijakan tersebut maka akan menciptakan dunia yang damai seperti yang mereka inginkan. Alih-alih menciptakan dunia yang damai, Taliban justru melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan dengan melakukan penculikan, pemerkosaan, dan pernikahan paksa. Bagi warga Afghanistan khususnya perempuan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Taliban justru mengekang kebebasan perempuan untuk bergerak di negaranya. Taliban juga menerapkan hukuman bagi setiap orang yang melanggar kebijakannya, seperti hukum cambuk, rajam, penghinaan publik hingga hukuman mati.

Selain itu, Taliban memerintahkan bagi para supir taksi untuk tidak mengantarkan perempuan yang tidak mengenakan burqa. Bahkan beberapa kali ada laporan ada seorang wanita muda yang ditemukan terbunuh karena tidak menggunakan burqa. Taliban juga pernah menghukum seseorang yang ketahuan mendengarkan musik di pasar dengan membiarkannya berjalan di bawah terik matahari tanpa menggunakan alas kaki sampai ia pingsan. Kelompok Taliban secara khusus juga menerapkan aturan sosial berupa bagi seseorang yang melanggar kebijakan Taliban, yaitu pelanggaran pertama akan diberikan peringatan yang selanjutnya jika ia melakukan pelanggaran kedua maka akan diberikan hukuman berupa penghinaan di depan umum, penjara, pemukulan, dan cambukan. Warga Afghanistan dipaksa untuk

menuruti semua aturan Taliban, dimana mereka menggunakan islam sebagai tujuan mereka sendiri sedangkan warga Afghanistan pun juga beragama islam tetapi mereka tidak mengenal islam seperti kelompok Taliban.

HAK KEBEBASAN PEREMPUAN SEBELUM DOMINASI TALIBAN

Sebelum kedatangan Taliban, perempuan di Afghanistan diberikan hak-haknya dalam masyarakat serta dilindungi di bawah hukum, yang berlaku di negaranya. Konstitusi Afghanistan sendiri telah mengatur kesetaraan bagi kaum perempuan dan memberikan hak untuk memilih. Hal tersebut menyebabkan munculnya sikap toleransi dan keterbukaan bagi negara Afghanistan yang akhirnya bergerak menuju ke arah demokrasi, perempuan dapat memberikan kontribusi penting bagi pembangunan nasional. Pada tahun 1977, lebih dari 15% perempuan adalah anggota badan legislatif tertinggi Afghanistan. Bahkan pada tahun 1990-an, diperkirakan sekitar 40% dokter, 50% pegawai pemerintahan, dan 70% guru sekolah di kota Kabul adalah perempuan. Perempuan Afghanistan sendiri telah aktif dalam berbagai organisasi kemanusiaan khususnya menegakan kebebasan serta kesetaraan bagi kaum perempuan hingga akhirnya Taliban memberlakukan peraturan yang membatasi kemampuan mereka untuk bekerja dan melakukan apa yang diinginkan.

Sebelum Taliban berkuasa, dibawah pendudukan Amerika Serikat Afghanistan akhirnya memiliki anggota parlemen perempuan dengan persentase sebesar 28% sekaligus menjadikan Afghanistan menduduki peringkat tertinggi di dunia dalam hal representasi perempuan di parlemen pada saat itu. Hal ini disebabkan oleh adanya konstitusi Afghanistan 2004 yang mengharuskan setidaknya 25 persen dari kuota parlemen diisi oleh perempuan. Akibatnya, Pemilu 2005 menjadi kesempatan terbesar bagi perempuan Afghanistan untuk berpartisipasi dalam kancah perpolitikan di negaranya. Selain itu, Perempuan pada masa itu memegang beberapa posisi penting seperti duta besar, menteri, gubernur, anggota polisi, dan pasukan keamanan. Selain itu, Tahun 2003 menjadi titik terang bagi perempuan Afghanistan karena di tahun itu pemerintah Afghanistan turut mengesahkan konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Konvensi ini mengharuskan negara-negara untuk memberlakukan peraturan mengenai kesetaraan gender ke dalam peraturan hukum mereka. Kemudian pada tahun 2004, konstitusi Afghanistan menyatakan bahwa warga Afghanistan, laki-laki dan perempuan, memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum.

Kemudian pada tahun 2009, sebuah undang-undang diterbitkan dengan tujuan melindungi perempuan Afghanistan dari pernikahan paksa, pernikahan di bawah umur, dan kekerasan. *Human Right Watch*, sebuah organisasi non-pemerintahan yang berbasis di AS, berpendapat bahwa undang-undang yang diterbitkan pada tahun 2009 tersebut mempunyai dampak besar dalam pelaporan dan investigasi mengenai kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Dengan adanya undang-undang tersebut, para pelapor mempunyai dasar hukum yang lebih kuat untuk menuntut pelaku pelanggaran undang-undang.

Undang-undang tersebut juga menjadi salah satu langkah pencegahan terjadinya kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Selain kemajuan dalam bidang hukum, jatuhnya Taliban pasca invasi AS juga menyebabkan banyak perubahan di sektor pendidikan. Afghanistan mencatat sejarah kenaikan tertinggi jumlah siswa yang

mendaftar di sekolah-sekolah dasar dengan lebih dari 4,3 juta siswa pada 2003. Di kelompok usia 7 sampai 12 tahun terdapat 40,5% siswa perempuan. Jumlah sekolah pun meningkat dengan signifikan, dari yang hanya 3,800 pada tahun 2002 menjadi 7,134 pada 2014. Di Universitas Kabul, sebanyak lebih dari 18,000 calon mahasiswa baru mengikuti ujian seleksi masuk perguruan tinggi di awal tahun 2002 (Ni'ami & Fitriana, 2022).

Dalam masa pendudukan AS, Afghanistan telah berubah dari yang hampir tidak ada anak perempuan bersekolah hingga memiliki puluhan ribu pelajar perempuan di universitas. Walaupun demikian, data mengatakan bahwa kemajuan yang sudah banyak terjadi menunjukkan angka yang termasuk lambat dan tidak stabil. Lambatnya angka pertumbuhan dapat dilihat dari persentase kenaikan jumlah perempuan yang mengakses pendidikan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir yang hanya naik sebesar 4,2%. Ketidakstabilan dapat dilihat dari data UNICEF yang melaporkan bahwa dari 3,7 juta anak di Afghanistan yang putus sekolah, 60% adalah perempuan. Jatuhnya Taliban pada tahun 2001 menyebabkan kesejahteraan para perempuan meningkat drastis. Walaupun demikian, peningkatannya bersifat parsial dan rapuh karena tidak mencakup seluruh perempuan yang disebabkan oleh keterbatasan fasilitas. Peningkatan kesejahteraan terkesan mudah jatuh kembali karena pada masa itu perempuan di Afghanistan masih belum sepenuhnya lepas dari pengaruh kepemimpinan Taliban (Ni'ami & Fitriana, 2022).

ANALISA UPAYA PERLAWANAN PEREMPUAN TERHADAP OPRESI TALIBAN

Setelah Taliban kembali mengambil alih Afghanistan dari AS, Taliban mulai memberlakukan peraturan yang merujuk pada pembatasan pergerakan perempuan. Pembatasan pergerakan yang dilakukan oleh Taliban menimbulkan berbagai reaksi, terkhususnya dari kaum perempuan. Sebagian besar kaum perempuan merasa bahwa Taliban berusaha untuk membuat perempuan seolah-olah tak terlihat dengan cara melarang perempuan untuk mengenyam pendidikan hingga bekerja. Sebagian besar kaum perempuan yang kontra dengan peraturan yang diberlakukan oleh Taliban, seperti larangan untuk bekerja, bersekolah, hingga aturan untuk berpakaian yang tidak boleh menyerupai gaya barat, melakukan berbagai upaya agar haknya dapat kembali. Berbagai upaya mereka tempuh mulai dari gugatan, unjuk rasa, hingga pelampiasan dalam bentuk mural.

Ada salah satu seorang jaksa perempuan Afghanistan yang bernama Farishta menggunakan kekuasaannya untuk menuntuk dan menjatuhkan hukuman bagi para anggota kelompok Taliban yang melakukan tindak kriminal, korupsi, hingga memukuli perempuan dan anak-anak. Namun, karena perbuatannya ia diancam oleh Kelompok Taliban sehingga ia harus hidup berpindah tempat agar tidak tertangkap. Kaum perempuan seperti Farishta mempunyai alasan yang kuat untuk takut akan acaman Taliban karena dua hakim perempuan Mahkamah Agung Afghanistan dan pejabat hukum yang bekerja di Kementerian Kehakiman Afghanistan tewas di kota Kabul yang dicurigai sebagai serangan balas dendam oleh kelompok Taliban. Akibat kejadian tersebut, para hakim perempuan memutuskan untuk bersembunyi dan meninggalkan Afghanistan.

Dalam kesempatan lain, kaum perempuan Afghanistan tidak ingin menyerah begitu saja walaupun pembatasan kebebasan yang dilakukan kelompok Taliban. Lima perempuan Afghanistan melakukan perundingan damai dengan kelompok militan

Taliban untuk menghentikan penderitaan perempuan di bawah kekuasaan Taliban. Mereka ditugaskan untuk menjamin hak perempuan tidak lagi di korbankan selama perundingan tersebut berlangsung. Kelima perempuan tersebut akan berunding dengan 16 orang delegasi pemerintahan Taliban yang hanya diwakili oleh kaum laki-laki. selain bernegosiasi penjaminan hak perempuan, mereka juga ingin memastikan bahwa Afghanistan tetap berbentuk republik dan wajib menjalankan hak dan kewajiban seperti negara-negara berbentuk republik lainnya. Namun, selama bernegosiasi, Taliban tidak membahas secara detail mengenai hak perempuan dan hanya menjanjikan bahwa Afghanistan akan menjadi negara yang lebih baik jika berada di bawah pemerintahannya. Para negosiator perempuan itu, tidak yakin dengan narasi perubahan yang telah disepakati oleh pimpinan Taliban yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh para kelompoknya di lapangan.

Perempuan yang tidak bekerja dalam pemerintahan Afghanistan juga ikut menyuarakan hak nya sebagai perempuan. Mereka menyatukan kekuatan untuk berani mendobrak aturan Taliban yang membatasi kebebasan. Adanya aturan bahwa setiap perempuan diwajibkan mengenakan burqa atau pakaian yang menutupi seluruh tubuh, sejumlah perempuan Afghanistan justru melakukan aksi protes dengan memamerkan foto mengenakan busana tradisional Afghanistan bernama Shalwar Kameez. Foto-foto tersebut kemudian diunggah ke dalam media sosial dengan tagar *#DoNotTouchMyClothes*. Dalam kampanye *online* tersebut, mereka berani tampil tanpa menggunakan hijab dan pakaian yang berwarna-warni. Aksi tersebut tergolong membahayakan karena mengancam nyawa mereka. Dengan mengunggah foto mereka ke dalam media sosial, kelompok Taliban akan dengan mudah menemukan informasi dari perempuan tersebut. Namun, kaum perempuan tidak takut dengan ancaman itu, mereka rela untuk masuk dalam perlawanan yang mempertaruhkan nyawanya daripada membukam dan menuruti aturan Taliban yang membatasi kebebasan berekspresi bagi kaum perempuan.

Larangan lain mengenai tidak diperbolehkannya berolahraga bagi perempuan karena dianggap tidak pantas dan tidak dibutuhkan bagi kaum perempuan, sekelompok perempuan Afghanistan bersepeda untuk mendobrak batasan gender tersebut. Walaupun di anggap sepele, dapat keluar dari rumah dan melakukan aktifitas olahraga merupakan suatu pencapaian yang luar biasa. Hal tersebut bisa menjadi kebiasaan baru bagi para perempuan Taliban masih berhubungan dengan olahraga, mantan kapten Timnas sepakbola putri Afghanistan mengajak rekannya untuk membakar seragam Timnas dan menghapus semua media sosial yang mereka miliki (Krishnan, 2021). Hal tersebut dilakukan untuk menyelamatkan nyawa mereka dari ancaman pembunuhan. Banyak atlet perempuan yang harus berhenti dari pekerjaannya karena kebijakan Taliban melarang perempuan untuk berolahraga. Mereka memiliki kesadaran politik yang tinggi mengenai hak-hak perempuan. Namun, karena kekuasaan politik telah dirampas oleh kelompok Taliban maka mereka memilih untuk menghapus semua jejak mereka sebagai Timnas agar selamat dari ancaman Taliban.

KENDALA PEREMPUAN AFGHANISTAN DALAM MENGHADAPI ANCAMAN TALIBAN

Aksi-aksi kaum perempuan Afghanistan menentang peraturan Taliban selalu memiliki kendala yang sama, yaitu berupa ancaman kekerasan hingga pembunuhan. Saat mereka berani bersuara maka taruhannya adalah nyawa. Selain itu, kebijakan-kebijakan Taliban juga sangat membatasi ruang gerak kaum perempuan. Berbagai keputusan yang diambil oleh Taliban sudah mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh mereka. Taliban sendiri pernah berjanji untuk menghargai hak asasi manusia dan hak perempuan. Namun, saat masa pemerintahannya semua jabatan diisi oleh kaum laki-laki. Sehingga menyebabkan terjadinya aksi demo yang menuntut untuk merubah susunan kabinet dan memasukan sebagian perempuan dalam pemerintahan. Para demonstran perempuan itu justru di cambuk oleh kelompok Taliban untuk membubarkan aksi demo tersebut.

Petinggi Taliban menilai bahwa perempuan tidak perlu berada dalam pemerintahan, mereka menganggap perempuan tidak sepatutnya memimpin kaum laki-laki. juru bicara Taliban juga pernah melontarkan pernyataan diskriminatif terhadap peran perempuan. Ia menyebut bahwa tugas seorang perempuan hanyalah melahirkan dan membesarkan anak. Secara tidak langsung pernyataan tersebut telah membatasi perempuan Afghanistan dalam hal politik dan edukasi. Karena kuatnya pemerintahan Taliban di Afghanistan, sudah banyak aksi perempuan yang mencoba untuk menyuarakan haknya justru terbunuh dan akhirnya mempengaruhi pemikiran perempuan yang lain. Mereka tidak ingin merasakan nasib yang sama seperti yang lainnya.

KESIMPULAN

Taliban menerapkan 13 kebijakan yang membatasi kebebasan perempuan, yaitu: 1) Dilarang bepergian kecuali diantar seorang laki-laki dari anggota keluarganya; 2) Dilarang berteman dengan laki-laki tanpa seizin anggota keluarganya; 3) Dilarang berinteraksi dengan laki-laki di atas 12 tahun selain anggota keluarganya; 4) Dilarang bersekolah di sekolah umum, mereka hanya boleh bersekolah di sekolah khusus perempuan; 5) Dilarang menggunakan riasan wajah termasuk cat kuku; 6) Dilarang bermain alat musik dan menari; 7) Jika perempuan bekerja, Kelompok Taliban akan mengawal mereka pulang dan memerintahkan untuk kerabat laki-laki perempuan tersebut saja yang bekerja; 8) Mewajibkan perempuan untuk mengenakan burqa (pakaian yang menutupi seluruh tubuh); 9) Dilarang berbicara menggunakan suara yang keras hingga terdengar oleh orang asing baik dalam pertemuan perempuan maupun di depan umum; 10) Dilarang menggunakan sepatu hak tinggi; 11) Dilarang duduk di balkon rumah; 12) Dilarang menampilkan gambar perempuan baik dalam perfilman maupun media yang lainnya; dan 13) Seorang guru dilarang memberikan pelajaran untuk siswa yang berjenis kelamin berbeda.

Kebijakan masa pemerintahan Taliban telah mengambil hak perempuan baik untuk bebas melakukan sesuatu hingga hak mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karena itu, perempuan melakukan aksi untuk menentang keijakan Taliban sekaligus meminta kembali hak yang seharusnya mereka dapatkan sebagai perempuan. Perempuan Afghanistan memiliki peranannya tersendiri dalam menghadapi ancaman

Taliban mulai dari negosiasi hingga berkampanye untuk menyatukan suara perempuan Afghanistan. Tetapi dalam menyuarkan hak-hak tersebut, mereka selalu dihadapi oleh ancaman kekerasan dan pemunuhan akibat menentang kebijakan Taliban. Kelompok Taliban berfikir bahwa mereka akan membuat Afghanistan menjadi negara yang lebih baik dari pemerintahan sebelumnya dengan cara menerapkan hukum islam yang mereka percayai. Namun, islam yang mereka percayai tidak sejalan dengan agama islam yang sebenarnya. Beberapa warga Afghanistan juga merupakan seorang muslim. Namun, yang mereka ketahui islaam memiliki ketentuan khusus memuliakan hak-hak perempuan dan anak-anak. Islam versi Taliban tidak didukung oleh muslim dunia. Mereka bertindak seakan-akan demi menjaga perempuan, kenyataannya mereka justru membuat perempuan dan anak-anak jatuh miskin, memperburuk kesehatan, dan merampas hak mereka atas mendidikan.

REFERENSI

- Azis, A. (2007). *Feminisme Profetik*. Kreasi Wacana.
- CNN Indonesia. (2021, September 16). *6 Aturan Taliban yang Kekang Perempuan Afghanistan*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210916104008-113-695127/6-aturan-taliban-yang-kekang-perempuan-afghanistan>
- Davies, R. (2021, August 16). *Afghanistan: Taliban Kembali Berkuasa, "Setiap Orang Ketakutan", Warga Meratapi Hilangnya Kebebasan*. BBC Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58227538>
- Hadiwinata, B. S. (2017). *Studi dan Teori Hubungan Internasional Arus Utama, Alternatif, dan Reflektif*. Yayasan Obor Indonesia.
- Ilyas, Y. (2007). *Konstruksi Pemikiran Gender dalam Pemikiran Musafir* [Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14469/>
- Krishnan, M. (2021, August 20). *Mantan Kapten Timnas Sepakbola Putri Afghanistan Ajak Rekannya Bakar Seragam*. Vice. <https://www.vice.com/id/article/e7n78z/taliban-kembali-berkuasa-mantan-kapten-timnas-sepakbola-putri-afghanistan-ajak-rekannya-bakar-seragam>
- Ni'ami, A. F., & Fitriana. (2022, March 2). *Perempuan Afghanistan: Keterbatasan dan Kekhawatiran* (F. Arrifqi (ed.)). Balairung Press. <https://www.balairungpress.com/2022/03/perempuan-afghanistan-keterbatasan-dan-kekhawatiran/>
- Rumadaul, F. A. (2017). Peran United Nation Women dalam Menanggulangi Diskriminasi Terhadap Perempuan di Afghanistan. *Global Political Studies Journal*, 1(1), 63–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v1i1.2136>
- Scott, J. (2000). *Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah*. Yayasan Obor Indonesia.
- Septiadi, G. A. (2019). Strategi Women for Women Internasional (WFWI) Dalam Pemberdayaan Perempuan di Afghanistan. *Frequency of Internasional Relations*, 1(1), 122–157. <https://doi.org/https://doi.org/10.25077/fetrian.1.1.122-157.2019>